

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eugenio Germani(1986), menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang menciptakan ketidakadilan sosial, di mana individu atau kelompok yang miskin tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan cara yang setara. Dalam pandangan ini, kemiskinan tidak hanya terkait dengan kekurangan material, tetapi juga dengan tidak setaraan sosial dan politik yang menghalangi kesempatan untuk berkembang. Kemiskinan adalah kondisi sosial-ekonomi di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan biasanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan yang sangat rendah, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti akses terhadap layanan publik, kualitas hidup, dan kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Kemiskinan dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: Tingkat pendapatan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, masalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, dan keterbatasan akses modal adalah beberapa faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi masalah kemiskinan. Fakta ini sering terjadi di negara berkembang, terutama di daerah pedesaan, dan sebagian besar menyebabkan penurunan kualitas pembangunan. Pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk pembangunan karena mereka akan memungkinkan orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan pendapatan yang tinggi, mengurangi kemiskinan.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti populer, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chirswardani suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) Kemiskinan (proper), 2) Ketidak berdayaan (powerless), 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) Ketergantungan (dependence), dan 5) Keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. (Mulia & Saputra, 2020)

Secara etimologi, kata kemiskinan berasal dari kata dasar miskin, yang dalam bahasa Indonesia merujuk pada kondisi kekurangan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terdiri dari pangan dan non-pangan, yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan. BPS juga mengukur kemiskinan dengan melihat beberapa dimensi tambahan, seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam seperti perikanan, pertanian, dan tambang. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan sehingga banyak masyarakat Sulawesi Tenggara yang ter golong dalam masyarakat miskin.

Tabel :1 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk Miskin (persen)
2015	2.499.540	28,51	11,13%
2016	2.551.008	27,76	10,70%
2017	2.602.389	25,58	10,12%
2018	2.653.654	25,67	9,66%
2019	2.704.737	24,78	9,41%
2020	2.615.030	317,32	11,69%
2021	2.659.940	323,26	11,74%
2022	2.704.610	314,53	11,27%
2023	2.749.010	321,53	11,43%
2024	2.715.292	319,71	11,21%

Sumber : BPS, 2024

Pada tabel 1, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2015-2024 terjadi pada tahun 2020 dengan total penduduk miskin 317,32 ribu jiwa. Kemudian kembali terjadi kenaikan penduduk miskin pada tahun 2021 dengan total jumlah penduduk miskin 323,26 di Provinsi Sulawesi Tenggara bersifat fluktuasi. Karena terus mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan.

Diketahui dari data BPS yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 3,22%, dengan mayoritas penganggur berasal dari kelompok usia produktif. Pendidikan yang tidak merata menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja, sehingga mereka sulit bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Ketimpangan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan juga masih merupakan permasalahan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah ini. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, tingkat pengangguran di Sulawesi Tenggara juga menjadi isu yang signifikan.

Tabel : 2 Jumlah penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Ribuan (Jiwa) Tahun 2015-2024

Kabupaten/Kota	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Buton	36,60	13,05	13,41	13,78	13,97	13,68	14,25	13,61	14,15	14,41
Muna	44,40	32,65	32,35	29,12	28,47	28,73	30,54	30,48	32,24	31,82
Konawe	37,40	38,14	37,99	33,40	31,25	31,63	32,46	31,09	33,09	33,99
Kolaka	27,20	28,56	26,64	24,74	24,00	23,76	33,45	31,56	32,96	33,20
Konawe selatan	34,10	33,94	33,73	33,73	33,89	34,22	36,17	35,79	36,84	37,09
Bombana	20,70	22,04	21,52	19,77	19,37	18,84	19,73	19,21	20,52	20,56
Wakatobi	16,10	15,73	15,48	14,20	14,14	13,75	15,30	15,01	15,35	14,93
Kolaka Utara	23,10	24,32	23,42	21,30	19,80	19,83	21,36	20,63	21,79	22,07
Buton Utara	9,50	9,60	9,63	9,38	9,18	9,13	9,45	9,13	9,09	9,18
Konawe Utara	5,80	5,79	8,44	8,82	8,67	8,78	9,26	9,02	9,01	8,94
Kolaka Timur	28,20	28,52	26,86	25,97	26,29	26,38	20,03	19,33	20,41	20,33
Konawe kep	5,30	5,70	5,97	5,87	5,86	5,88	5,98	5,47	5,44	5,36
Muna Barat	-	12,37	12,89	11,39	11,52	11,32	11,55	11,56	11,81	11,36
Buton Tengah	-	12,33	16,73	13,72	14,64	14,40	14,73	11,92	14,46	13,52
Buton Selatan	-	10,75	12,66	11,86	11,81	11,50	11,71	11,57	11,88	11,50
Kota Kendari	19,30	19,58	18,44	17,76	17,30	17,46	19,46	18,72	19,24	18,20
Kota Bau-bau	14,30	13,87	13,55	12,59	12,42	12,53	13,30	12,69	13,29	13,25
Sulawesi Tenggara	321,90	326,86	331,71	307,10	301,82	301,82	318,70	309,79	321,53	319,71

Sumber BPS 2024

Pada tabel 2 diketahui jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara menyebar ke seluruh kabupaten dan hanya beberapa kota saja yang jumlah penduduk miskinnya paling rendah. Pada pada tahun 2015, jumlah miskin meningkat terdapat di Kabupaten Muna dengan total 44,40 ribu jiwa. Namun pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin meningkat kembali terdapat di Kabupaten Konawe dengan total 33,99 ribu jiwa.

Melihat angka kemiskinan yang cukup tinggi, Sehingga membutuhkan peran pemerintah agar membuat strategi dan juga kebijakan yang tepat dan langsung pada sasaran. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari sisi ekonomi adalah rendahnya pendidikan yang membuat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas sumber daya rendah, maka produktivitas rendah dan upahnya juga akan rendah (Kuncoro. 2006). Sebaliknya, apabila memiliki pendidikan yang tinggi, maka kualitas sumber daya akan meningkat. Sehingga produktivitas akan meningkat dan upah juga akan meningkat. Rendahnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan menjadi penyebab rendahnya produktivitas kaum miskin. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor pendidikan, akses terhadap kesehatan, dan peluang kerja berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara tingkat pendidikan, pengangguran, akses fasilitas kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan pejabaran fenomena masalah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran fenomena masalah pada latar belakang maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, Berikut manfaat penelitian :

1. Bagi Mahasiswa
Memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan serta meningkatkan kemampuan analisis data dalam penelitian ekonomi dan sosial.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Menjadi referensi akademik yang memperkaya literatur penelitian terkait ekonomi regional serta mendukung pengembangan solusi berbasis penelitian untuk pengentasan kemiskinan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas atau pendekatan metodologi yang lebih mendalam untuk memahami dinamika kemiskinan di daerah lain.